

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Anwar, Ak Moch. *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2001.
- Ariman, H. M. Rasyid dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Gayo, Ahyar Ari, *Notaris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan dan Perbuatan Pidana)*, Balitbangkumham Press, Jakarta, 2020.
- Ghofur, Abdul. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- _____. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: Alumni dan Pustaka Kartini, 1986.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.

- _____. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- _____. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2003.
- _____. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- _____. *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Mulyoto. *Perjanjian Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai*. Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012.
- Pane, Musa Darwin. *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Logos Publishing, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1989.
- _____. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Putra, Mohammad Eka dan Abul Khair. *Percobaan dan Penyertaan*. Medan: USU Press, 2009.
- Richard dan Suyanto. *Teknik Pembuatan Akta Edisi Lengkap (TPA I, II, III)*. Bandung: Cendikia Press, 2018.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Balai Pustaka Jakarta 2018
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____. *Hukum Perjanjian: Perjanjian Pada Umumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHEAM-PETEHAEM, 2002.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Sugandhi, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

Sumardjono, Maria S.W. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Supriadi. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penulisan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

B. Jurnal

Ambarita, Septerina. "Analisis Yuridis Akta Perjanjian Jual Beli yang dijadikan Dasar Hutang Piutang Oleh Notaris." *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (Maret 2022).

Ara, Made dan I Made Dedy. "Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 1 (Desember 2019).

Fitriani, Lestari. "Penerapan Asas Kehati-hatian dalam Praktik Kenotariatan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022).

Harahap, Rizky. "Pertanggungjawaban Perdata Profesi Notaris." *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure* 4, no. 1 (2021).

Habib Adjie, Asas Praduga Sah dalam Akta Notaris sebagai Akta Otentik, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Fakultas Hukum UII, Vol. 23 No. 2, 2016

- Habib Adjie, "Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Otentik," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23 No. 2, 2016,
- Hendra, Rahmad. "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (April 2015).
- Irianto, Sigit. "Pemahaman Tentang Pengertian Pasal 1321 KUHPerdara Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Spektrum Hukum* 17, no. 1 (2020).
- Kholis, Faiz. "Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta (Medepleger) dalam Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018).
- Kristianto, Agus. "Pertanggungjawaban Pidana Notaris terhadap Keterangan Palsu dalam Akta Autentik." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* (2024).
- Rai Mantili, *Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateril atas Perbuatan Melawan Hubungan dengan Asas Kepastian Hukum*, *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1, 2019.
- Ma'ruf, Umar dan Dony Wijaya. "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 11, no. 4 (September-Desember 2015).
- Mido, Muhammad Tiantanik Citra. "Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris." *Jurnal Lentera Hukum* 5, no. 1 (2018).
- Muhtarom, M. "Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak." *Jurnal Publikasi Ilmiah* 26, no. 1 (Mei 2014).
- Mulyadi, Dudung. "Unsur-unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017).
- Pratama, Rahman. "Asas Kerahasiaan dalam Jabatan Notaris." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 10, no. 2 (2020).
- Sasauw, Cristin. "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris." *Jurnal Lex Privarium* 3, no. 1 (Januari-Maret 2015).
- Siahaan, Kartini. "Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Recital Review* 1, no. 2 (Juli 2019).
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Lex Crimen* 7, no. 5 (2018).

Sulaeman, Aep. “Penyelundupan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang dengan Cara Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 10, no. 2 (September 2020).

Sulistiyowati, H. dan L. Warsito. “Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik dalam Peralihan Hak atas Tanah: Peran dan Tanggung Jawab Notaris.” *Justicia: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2025).

Wahyu Wijayanti, Nurul dan Siti Malikhatus Badriyah. “Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Dengan Adanya Tipu Muslihat dan Daya Paksa (Studi Kasus Putusan Nomor 241/PDT/2020/PT.BDG).” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (2024).

Waluyo, Dody Radjasa. “Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum.” *Media Notariat (Menor)* (Oktober-Desember 2001).

Wijaya, Tahta Fortuna Maharani dan Ery Agus Priyono. “Penerapan Asas Profesionalitas Pada Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik.” *Lex Renaissance* 9, no. 2 (2024).

Yonnawati dan Dina Haryati Sukardi. “Akta Partij Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tentang Jabatan Notaris Dalam Rangka Perwujudan Kepastian Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.